

PENGARUH KEBIJAKAN SUBSIDI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

Farizki Aji Pratamaaa¹, Dinda Atika Sari², Putri Hayati³, Laura Luxsyannela⁴
farizkiajip@gmail.com¹, saridindaatika054@gmail.com²,
19putrihayati@gmail.com³, lauraluxsyannela@gmail.com⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of subsidy policies on household consumption decisions, with a focus on basic needs sectors such as energy, food and education. Government subsidies play an important role in maintaining people's purchasing power, especially low-income groups. This study uses a quantitative approach with survey methods and analysis of secondary data from government reports and household data. The research results show that subsidy policies have a significant effect on household consumption patterns. Energy subsidies, such as electricity and fuel, tend to increase expenditure allocations for other needs such as education and health. On the other hand, reducing subsidies has an impact on reducing purchasing power and forcing households to reduce consumption of secondary needs. These policy implications underscore the importance of designing well-targeted subsidies to minimize economic distortions and ensure the welfare of vulnerable households.

Keywords: Subsidy Policy, Household Consumption, Purchasing Power, Basic Needs, Policy Analysis.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan subsidi terhadap keputusan konsumsi rumah tangga, dengan fokus pada sektor kebutuhan dasar seperti energi, pangan, dan pendidikan. Subsidi pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis data sekunder dari laporan pemerintah serta data rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga. Subsidi energi, seperti listrik dan bahan bakar, cenderung meningkatkan alokasi pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, pengurangan subsidi berdampak pada penurunan daya beli dan memaksa rumah tangga mengurangi konsumsi kebutuhan sekunder. Implikasi kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya perancangan subsidi yang tepat sasaran untuk

meminimalkan distorsi ekonomi dan memastikan kesejahteraan rumah tangga yang rentan.

Kata Kunci: Kebijakan Subsidi, Konsumsi Rumah Tangga, Daya Beli, Kebutuhan Dasar, Analisis Kebijakan.

PENDAHULUAN

Kebijakan subsidi merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi. Subsidi diberikan dalam bentuk pengurangan harga pada barang atau jasa tertentu, seperti bahan bakar minyak, listrik, pangan, atau pendidikan. Tujuan utama Kebijakan subsidi merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi. Subsidi diberikan dalam bentuk pengurangan harga pada barang atau jasa tertentu, seperti bahan bakar minyak, listrik, pangan, atau pendidikan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan akses yang lebih terjangkau kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, terhadap kebutuhan dasar.

Rumah bukan lagi sekedar tempat berteduh tetapi harus memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilik nya. Dalam hal sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi Indonesia

adalah Negara dengan sumber daya yang cukup dan dapat diterima. Telah terjadi kenaikan harga bensin premium, minyak tanah, solar, dan bahan bakar lainnya. Dalam konteks konsumsi rumah tangga, kebijakan subsidi memiliki pengaruh yang signifikan. Subsidi dapat meningkatkan daya beli rumah tangga dengan mengurangi pengeluaran untuk barang atau jasa bersubsidi, sehingga sisa pendapatan dapat dialokasikan. Untuk kebutuhan lain. Namun, kebijakan subsidi juga dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Misalnya, subsidi bahan bakar dapat meningkatkan konsumsi energi, sementara subsidi pangan dapat mendorong peningkatan kualitas gizi rumah tangga.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah mengalokasikan dana untuk belanja subsidi nonenergi Rp 72,93 triliun pada 2022. Nilai tersebut persentasenya mencapai 35,24% dari total belanja subsidi. Pemerintah memangkas total belanja subsidi 16,73% menjadi Rp 206,96 triliun pada

tahun ini dari 2021 (outlook) sebesar Rp 248,56 triliun. Melalui pembahasan ini, akan dikaji pengaruh kebijakan subsidi terhadap keputusan konsumsi rumah tangga, dengan menyoroti manfaat, tantangan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana subsidi dapat dikelola secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi listrik untuk pelanggan yang sebagian besar adalah golongan R1-450 VA dan R1-900 VA, yang mencakup sekitar 85 persen dari total pelanggan. Di Provinsi Sumatera Barat, kebijakan subsidi listrik ini telah diterapkan, akan tetapi masih belum diterapkan dengan baik. Berdasarkan data dari Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, terdapat 335.210 penduduk miskin di provinsi tersebut. Dari 19 Kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Kota Padang merupakan kota dengan angka kemiskinan tertinggi sebanyak 42,37 ribu jiwa di Kota Padang. Dengan banyaknya jumlah penduduk kurang mampu di daerah ini tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi seperti inilah pemerintah berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan subsidi

listrik tepat sasaran terhadap rumah tangga tidak mampu.

Tabel 1. Jumlah Penerima Subsidi Listrik di Kota Padang

NO	Wilayah	Jumlah Penerima Subsidi Listrik Daya 450	Jumlah Penerima Subsidi Listrik Daya 900
1	Nanggalo	117	284
2	Bungus Teluk Kalung	97	151
3	Lubuk Kilangan	108	228
4	Padang Utara	106	217
5	Padang	354	182
6	Kiranti	171	308
7	Padang Barat	122	237
8	Padang Timur	143	281
9	Padang Selatan	114	312
10	Koto Tengah	197	296
11	Lubuk Begadung	233	249

Sumber Dinas Sosial Kota Padang, 2022

Berdasarkan data yang tersedia mengenai jumlah penerima subsidi listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA di berbagai wilayah Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa distribusi penerima subsidi listrik cukup beragam antar wilayah. Secara umum, jumlah penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA lebih tinggi dibandingkan dengan daya 450 VA di hampir semua wilayah. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kebutuhan daya listrik pada setiap rumah tangga, di mana sebagian besar rumah tangga yang berpenghasilan rendah lebih banyak menggunakan daya 900 VA untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari.

STUDI LITERATUR Kebijakan Subsidi

Subsidi adalah bantuan uang atau komoditas, rumah tangga atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos,

Jr. dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Economics*, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima. Secara Singkatnya, pengertian subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan. Bentuk subsidi bisa Materi, Uang, Kebutuhan sembako, Barang hingga keringanan biaya. Biasanya, golongan yang menjadi penerima subsidi adalah rumah tangga golongan menengah ke bawah. Subsidi yang di berikan pemerintah ini bersumber dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh pemerintah kembali lagi ke dalam lingkup masyarakat melalui pemberian subsidi

Organisasi, dan masyarakat sipil. Interaksi antara aktor-aktor ini dapat memengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan dan dijalankan. Konteks Lokal yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi di tingkat lokal. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi bagaimana kebijakan diterima dan dijalankan oleh masyarakat, serta Pengawasan dan Evaluasi yang implementasinya perlu diawasi dan dievaluasi guna pemberian subsidi yang tepat sasaran

Jadi Kebijakan subsidi adalah Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi

aktor, konteks lokal, serta pengawasan dan evaluasi. Interaksi antara berbagai aktor, seperti petugas pemerintah, birokrat, organisasi, dan masyarakat sipil, memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi di tingkat lokal sangat memengaruhi penerimaan dan keberhasilan kebijakan di masyarakat. Agar kebijakan, seperti pemberian subsidi, dapat tepat sasaran, diperlukan pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan Konsumsi Barang Bersubsidi

Subsidi merupakan mekanisme yang dirancang pemerintah untuk menurunkan harga barang atau jasa tertentu sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan adanya subsidi, biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk barang atau jasa tersebut menjadi lebih rendah, yang sering kali mendorong peningkatan konsumsi. Fenomena ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek:

a. Keterjangkauan Harga

Subsidi menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga pasar, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mampu membeli atau mengakses barang tersebut kini dapat melakukannya. Sebagai contoh, subsidi bahan bakar menjadikan

transportasi lebih terjangkau, atau subsidi pangan membantu rumah tangga membeli makanan pokok dalam jumlah yang lebih banyak.

b. Elastisitas Permintaan

Barang bersubsidi, terutama barang kebutuhan dasar, sering kali memiliki permintaan yang elastis terhadap harga. Ketika harga turun karena subsidi, konsumsi barang tersebut cenderung meningkat. Misalnya, subsidi listrik mendorong rumah tangga menggunakan peralatan listrik lebih sering atau dalam jumlah yang lebih besar.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan konsumsi barang bersubsidi, terutama yang bersifat esensial seperti pangan, energi, dan kesehatan, berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, subsidi pendidikan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal, yang berdampak pada pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

d. Risiko Konsumsi Berlebihan

Peningkatan konsumsi barang bersubsidi juga dapat menimbulkan risiko konsumsi berlebihan. Misalnya, subsidi energi seperti bahan bakar fosil dapat mendorong penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan, yang pada akhirnya berkontribusi

pada kemacetan dan polusi udara. Hal ini menjadi perhatian penting dalam merancang kebijakan subsidi agar tetap efisien dan tidak menyebabkan pemborosan.

e. Distorsi Pasar

Peningkatan konsumsi barang bersubsidi terkadang menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar. Harga yang lebih rendah akibat subsidi dapat mengurangi insentif masyarakat untuk mencari alternatif atau solusi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Misalnya, subsidi bahan bakar fosil dapat menghambat pengadopsian energi terbarukan.

f. Pentingnya Subsidi yang Tepat Sasaran

Untuk memastikan bahwa peningkatan konsumsi barang bersubsidi berdampak positif, subsidi harus diberikan secara tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Subsidi yang tidak terarah dapat menyebabkan kelompok mampu menikmati manfaat lebih besar daripada kelompok rentan, sehingga tujuan pemerataan ekonomi tidak tercapai.

Materi

Jenis Subsidi yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga

Subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah atau

lembaga tertentu untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Subsidi ini berperan penting dalam memengaruhi pola konsumsi rumah tangga karena dapat meningkatkan daya beli dan mengarahkan alokasi pengeluaran. Berikut adalah beberapa jenis subsidi yang memengaruhi konsumsi rumah tangga:

a Subsidi Energi

Subsidi energi, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, atau gas, bertujuan untuk mengurangi biaya energi yang harus dibayar oleh rumah tangga. Dengan adanya subsidi ini, rumah tangga dapat mengalokasikan pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau konsumsi makanan.

b Subsidi Pangan

Subsidi pangan diberikan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, atau tepung. Subsidi ini membantu rumah tangga berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa mengorbankan alokasi pengeluaran untuk kebutuhan lain.

c Subsidi Pendidikan

Subsidi pendidikan berupa pengurangan atau penghapusan biaya sekolah, bantuan dana pendidikan, atau beasiswa. Jenis subsidi ini memengaruhi konsumsi rumah tangga

dengan mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, sehingga memungkinkan rumah tangga mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dimulai dari studi literatur, yaitu mencari referensi dari berbagai sumber, kemudian melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, data yang telah didapat selanjutnya dianalisis untuk digunakan sebagai masukan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa subsidi memengaruhi konsumsi rumah tangga, dengan mengubah alokasi pengeluaran yang dibuat sudah sesuai harapan atau belum. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang menyatakan bahwa hasil dari metode ini efektif dalam penunjang keputusan.

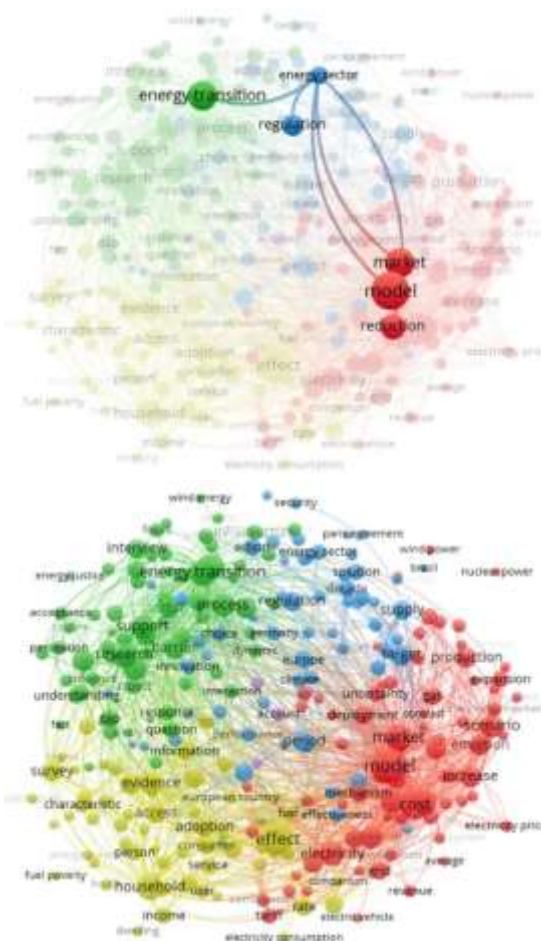
HASIL DAN PEMBAHASAN

Subsidi Energi

Kebijakan energi terbarukan memainkan peran penting dalam transisi dari bahan bakar fosil menuju sumber energi ramah lingkungan. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan dalam adopsi energi terbarukan, seperti misalnya tantangan teknologi, kendala finansial, dan regulasi yang kompleks (Solikah & Bramastia, 2024). Pemerintah berperan krusial dalam

mendukung proses ini melalui mekanisme seperti feed-in tariff, insentif pajak, sertifikat energi terbarukan (REC), dan subsidi langsung, yang mengurangi risiko finansial serta menarik minat investor dan konsumen. Selain itu, regulasi seperti Renewable Portfolio Standards (RPS) dan net-metering mengharuskan utilitas untuk mengintegrasikan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, menciptakan pasar bagi energi hijau dan mempercepat adopsinya (Eze et al., 2023; Sobrosa Neto et al., 2020).

Dalam penelitian ini, hasil analisis sitasi menunjukkan dari total 609 artikel, didapatkan 2.234 sitasi yang dimulai pada tahun 2019 - Februari 2024. Pola sitasi ini bervariasi setiap tahun, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang mencatat 605 sitasi. Pada gambar 3 dapat kita lihat hubungan antar jurnal berdasarkan frekuensi sitasi, di mana jurnal yang sering dikutip memiliki node yang lebih besar dan terhubung dengan banyak jurnal lain. Hasil visualisasi ini juga menunjukkan bahwa topik yang paling sering dibahas dalam tema kebijakan energi baru terbarukan meliputi pemodelan, regulasi, transisi energi, pasar energi, dan pengurangan emisi.



Gambar 3. Visualisasi frekuensi sitasi dan trending topik

Sumber : dalam tema kebijakan energi baru terbarukan (diolah peneliti, 2024)

Saat ini listrik menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena hampir setiap aktivitas masyarakat sangat tergantung pada ketersediaan tenaga listrik. Listrik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari contohnya sebagai sumber penerangan, memasak, transportasi, dan lain sebagainya. Sejalan dengan peningkatan kualitas hidup yang

semakin tinggi maka konsumsi energi mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Grafik 1. 1 Rumah Tangga Pengguna Sumber Penerangan Listrik PLN di Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik

Subsidi Pangan

Kondisi ketahanan pangan di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan, salah satunya fenomena El Nino. El Nino memiliki potensi menghambat produksi pangan baik secara regional maupun global yang dampaknya bisa sangat signifikan jika daerah yang biasanya menjadi produksi pangan utama terkena dampaknya. Jika produksi pangan menurun akibat El Nino, sementara permintaan tetap tinggi atau bahkan meningkat, bisa terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Sebagaimana situasi perberasan di Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan serius meliputi, penurunan produksi, penurunan stok beras, kontribusi inflasi beras, kelangkaan pupuk, menurunnya kinerja jasa sinta, dan menurunnya pendapatan petani (Saefudin, 2023).

meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa masyarakat miskin dapat hidup dengan layak (Tumbel et al., 2021). Tujuan utama dari program bantuan pangan beras CPP adalah untuk memastikan ketersediaan pangan, bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem seperti El Nino. Jumlah beras yang disalurkan sebanyak 10 kg dari bulan Januari sampai Juni 2024. Adapun sasaran penerima manfaat program bantuan pangan tersebut sebanyak 22.004.077 KPM, yang terbagi dalam kelompok desil 1 sebanyak 6.878.649 keluarga, desil 2 sebanyak 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga (Badan Pangan Nasional, 2024).

Subsidi Pendidikan

Di Indonesia, upaya untuk menyediakan pembiayaan pendidikan yang memadai telah menjadi fokus pemerintah dan para peneliti. Meskipun literatur mengenai jenis dan sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia telah berkembang, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai topik ini. Di dalam artikel Habibi dkk., (2022) dengan judul "Analisis Manajemen Pembiayaan di

Sekolah” belum mencantumkan landasan hukum, yang mana landasan hukum ini penting sebagai patokan lembaga pendidikan dalam perencanaan keuangan di lembaga pendidikan tersebut.

Namun, dibalik landasan hukum yang menjadi patokan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai. Amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat ketidaksesuaian dilapangan. Di dalam artikel Fironika (2015) dijelaskan bahwa, masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia adalah tidak mencukupinya anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, terdapat tantangan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Kemudian, mahalnya biaya pendidikan yang membuat akses pendidikan terbatas bagi sebagian masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) dan (2) yang menyatakan setiap warga

negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pembiayaan pendidikan melibatkan konsep alokasi sumber daya untuk mendukung kegiatan dan program operasional pendidikan. Dalam konteks ini, pendanaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan semua pihak, termasuk orang tua dan masyarakat. Landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) dan Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional. Jenis pembiayaan pendidikan mencakup biaya langsung dan tidak langsung, biaya rutin dan pembangunan, biaya pribadi dan masyarakat, serta biaya moneter dan non-moneter.

Resume Jurnal

Subsidi Di Indonesia

Penulis : (Anugrah Stephen Soen*, Herry Sugianto*, Ricky Theodorus dan Supeni Anggraeni Mapusari Universitas Presiden, Cikarang – Indonesia)

Peran subsidi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. *Daya beli* (purchasing power) adalah kemampuan individu untuk membeli

barang dengan sejumlah uang tertentu. Subsidi merupakan alat penting pemerintah, tetapi pengalokasiannya harus mempertimbangkan kemampuan finansial negara. Contohnya, pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sering memicu protes dalam 20 tahun terakhir karena BBM merupakan kebutuhan vital bagi berbagai lapisan masyarakat. Meski demikian, subsidi yang tepat dapat menurunkan harga barang hingga di bawah atau setara dengan harga keseimbangan pasar, sehingga menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Analisis subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari 2015 hingga 2019 menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. Namun, pada masa pandemi, subsidi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena besarnya anggaran yang harus dikeluarkan. Pemerintah mengeluarkan Rp367,4 triliun dalam dua tahun pandemi untuk membantu masyarakat dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat dan memulihkan ekonomi Indonesia.

Analisis Keputusan Masyarakat Jenangan Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Di Masa Pandemi

Penulis : Alfania Yulantias^{1, *}, Amanda Kamaliyah Rosyadah², Augustin Rina Herawati³, Kismartini⁴

kebijakan subsidi listrik yang diterapkan selama pandemi Covid-19 untuk membantu masyarakat, khususnya di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Program subsidi mencakup pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA. Namun, implementasi program tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

a **Kegagalan Implementasi Subsidi:**

- o Sebanyak **54,5% pelanggan 450 VA** tidak menerima pembebasan biaya listrik selama April-Juni 2020.
- o Sebanyak **81,3% pelanggan 900 VA** tidak menerima diskon 50% yang dijanjikan.

b **Kepuasan Masyarakat:**

- o Hanya **20% responden sangat puas**, 20% puas, 16,7% cukup puas, dan 3,3% kurang puas. Sebagian besar (40%) merasa tidak puas dengan program subsidi listrik.

c **Masalah Utama:**

- o Ketidakefisienan penyaluran subsidi listrik.

- o Kurangnya validasi data penerima manfaat.

Pengaruh Kenaikan Harga BBM Subsidi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tulungagung

Penulis : Novia Marchelia Putri Az Zahra¹ , Isa Runtu Leluni² , Imroatus Nafisah³ ,Ahmad Choiron Nur Rizqi⁴ , Novi Khoirawati⁵

kenaikan harga BBM subsidi memiliki *pengaruh signifikan* terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Tulungagung pada periode 2008-2023. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan koefisien determinasi sebesar 74,7%, yang menandakan pengaruh kenaikan harga BBM subsidi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga cukup besar.

Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia

Penulis : Irma Chintia Simbolon¹, Lusyana Karolina Sidebang² Natasia Theofani Margaret³, Sheryl Valencia Pangaribuan⁴ Putri Kemala Dewi Lubi⁵

Kenaikan harga BBM berdampak besar pada masyarakat dan ekonomi Negara. Penyebabnya meliputi kenaikan harga minyak global, konflik internasional, dan ketidakseimbangan

pasokan serta permintaan. Dampaknya mencakup naiknya harga barang dan jasa, biaya transportasi, serta kebutuhan pokok, yang memicu perlambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah dapat mengatasi dampak ini melalui subsidi, program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pembatasan kendaraan. Subsidi membantu menjaga harga tetap terjangkau, sementara perlindungan sosial mendukung masyarakat yang terdampak. Investasi dalam transportasi umum dan efisiensi bahan bakar mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sedangkan pembatasan kendaraan mengontrol konsumsi BBM.

Pengaruh Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Provinsi Sumatera Barat

Penulis : Nurma Oktavia Sari¹, Ariusni²

subsidi listrik memiliki pengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga di Sumatera Barat, sementara status pekerjaan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan wilayah tempat tinggal berpengaruh negatif pada tahun 2022. Penulis menyarankan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi faktor lain yang

memengaruhi subsidi listrik terhadap konsumsi rumah tangga. Pemerintah diharapkan lebih memprioritaskan subsidi listrik untuk rumah tangga miskin, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, masyarakat disarankan untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan listrik secara hemat dan bijak dengan menerapkan pola hidup sederhana.

Kinerja Lingkungan Rumah Subsidi Di Indonesia (Studi Kasus Perumahan Kaba Residence Kendari)

Penulis : Ali Amin Soewarno¹

Penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara orientasi bangunan hunian bersubsidi dengan total radiasi matahari yang diterima, karena selisihnya hanya sekitar 6%. Atap menjadi bagian bangunan yang menerima radiasi terbesar, menyebabkan suhu ruang di bawahnya meningkat. Orientasi ruang terhadap arah mata angin memiliki pengaruh lebih besar terhadap suhu ruang. Meskipun orientasi bangunan berbeda, fluktuasi suhu dalam ruangan cenderung serupa, karena dipengaruhi oleh volume/massa bangunan. Faktor utama yang memengaruhi suhu ruang meliputi orientasi terhadap matahari, material bangunan, bukaan, dan naungan. Hasil simulasi menggunakan Ladybug menunjukkan tingkat kenyamanan

termal (TCP) untuk PMV dan Adaptive masing-masing sebesar 77% dan 80%, sedangkan simulasi dengan Honeybee EnergyPlus menghasilkan TCP sebesar 39,21% untuk PMV dan 87,45% untuk Adaptive.

Dampak Belanja Subsidi Dan Bantuan Sosial Dari APBD Terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia

Penulis : Sandi Asep Ramdani¹

Kebijakan pemerataan ekonomi menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak belanja pemerintah, seperti subsidi dan bantuan sosial (bansos), terhadap kesenjangan pendapatan selama 2007–2022, meliputi era Jokowi dan sebelumnya. Dengan metode OLS dan Difference in Difference (DiD), hasil menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan bansos saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori redistribusi pendapatan. Analisis OLS mengungkap bahwa subsidi memiliki pengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan, meski tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan proses seleksi penerima subsidi belum optimal, sehingga masih banyak masyarakat berpenghasilan tinggi yang menikmatinya. Sementara itu, bansos menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, menandakan distribusi

bansos kurang tepat sasaran dan justru meningkatkan ketimpangan.

Analisis DiD mendukung temuan bahwa peningkatan belanja subsidi dan bansos belum efektif dalam mendukung pemerataan ekonomi, menunjukkan perlunya perbaikan dalam seleksi penerima dan penyaluran program bantuan.

Analisis Perilaku Konsumen dalam Menentukan Keputusan Pembelian Rumah Bersubsidi Tipe 36

Penulis : Teguh Hermawana*, Yuni Firayantia , Marhamaha

Penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen di PT Borneo Real Properti adalah kualitas yang terjamin, lokasi strategis, serta harga yang sesuai dengan kualitas dan fasilitas yang ditawarkan. Proses pembelian melibatkan pencarian informasi, evaluasi, dan tahap pasca pembelian. Selain itu, faktor ekonomi pribadi dan sosial, seperti dorongan dari keluarga atau saran teman, juga berperan penting dalam keputusan konsumen. Sebelum membeli, konsumen melalui tahapan analisis untuk memastikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Pendekatan Dan Pemecahan Masalah Implementasi Kebijakan Subsidi

Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Penulis : Adventus Managam Simbolon¹, Budiman Rusli², Candradewini³

Kebijakan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diterapkan oleh Kementerian PUPR dinilai cukup berhasil dalam mendukung pembangunan rumah bersubsidi. Namun, evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini tetap diperlukan karena masih terdapat masalah, seperti ketidaktepatan sasaran penerima subsidi dan pelanggaran pemanfaatan rumah subsidi. Untuk mengatasi masalah tersebut, direkomendasikan adanya penegakan sanksi tegas, seperti pencabutan subsidi jika terjadi pelanggaran, serta pengawasan ketat yang melibatkan pengembang dan pengurus lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu menganalisis minat calon debitur secara mendalam saat proses verifikasi kredit untuk memastikan subsidi diberikan kepada pihak yang tepat.

Analisis Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Pada Perumahan Bersubsidi Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelana)

Penulis : Burhan Hanafi¹ , Tuti Anggraini² , Nurul Inayah³

Pelaksanaan KPR di Bank Sumut Syariah Kota Baru Marelan dengan akad murabahah dinilai berjalan baik, karena mengikuti prosedur sesuai aturan. Kerja sama antara Bank, PUPR, dan Developer memastikan KPR tepat sasaran, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik yang berpenghasilan tetap maupun harian. Efektivitas penyaluran pembiayaan mencapai 95%, dengan 5% belum efektif akibat masalah teknis setelah pencairan. Meski demikian, pihak bank telah memiliki solusi untuk menangani kendala tersebut.

Analisis Pengambilan Keputusan Pemerintah Dalam Pengalihan Subsidi BBM Guna Pemenuhan Kebutuhan Menggunakan Metode Tree Analysis

Penulis : Erika Sri Nurhadi¹, Galuh Ayu Bunga Tiara², Revienda Anita Fitri³

Penghapusan subsidi BBM dilakukan untuk mengurangi beban APBN akibat lonjakan harga minyak mentah dunia. Anggaran dialihkan untuk infrastruktur dan kebutuhan lainnya, meski berdampak pada kenaikan harga barang, jasa, dan tekanan ekonomi masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan seperti BLT-BBM, Subsidi BSU, dan DTU agar subsidi lebih tepat sasaran.

Analisis menunjukkan penyebab utama adalah konsumsi energi yang boros, beban anggaran tinggi, serta ketidaktepatan sasaran subsidi. Dampaknya meliputi kenaikan harga BBM, perubahan pola konsumsi energi, dan peningkatan biaya distribusi.

Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Subsidi Dan Pendidikan : Tidak Ada Hubungan Langsung Dengan Kemiskinan

Penulis : Wisda Zulaeha Suwardi¹, Nurhidayati Islamiah²

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan subsidi pemerintah dapat membantu mengurangi kemiskinan, meski dampaknya tidak signifikan secara statistik. Penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pengeluaran pemerintah, alokasi dana pendidikan, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Hasil ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas kemiskinan secara efektif.

Implementasi Subsidi Listrik untuk Mendorong Pencapaian SDGs Tujuan 7

Penulis : Vira Kirana Ningsih*, Silva Syalikha

Subsidi listrik di Indonesia mendukung pencapaian SDGs Tujuan

7 dengan meningkatkan akses energi bagi rumah tangga miskin dan daerah terpencil, serta mengurangi beban biaya hidup. Namun, efektivitas program ini terganggu oleh penargetan subsidi yang kurang tepat dan masalah teknis seperti jaringan listrik yang tidak andal dan distribusi yang tidak merata. Perbaikan diperlukan agar tujuan energi yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai : Seberapa Besar Dampak Terhadap Masyarakat Indonesia?

Penulis : Anggi Prastyono¹⁾, Fera Sandrina²⁾

Subsidi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) memiliki dampak signifikan pada ekonomi (27,1%), lingkungan (40,9%), dan sosial (57,2%). Meski mendukung transisi energi, masyarakat masih khawatir KBLBB berkontribusi pada polusi udara, sehingga optimalisasi energi terbarukan menjadi prioritas. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperluas cakupan wilayah responden untuk representasi yang lebih baik dan mendalam. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih spesifik dampak subsidi KBLBB terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kebijakan Publik Indonesia (Studi pada Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan BBM Subsidi Tahun 2024)

Penulis : Wahyu Trisno Aji¹ , Mohammad Solekhan²

Kebijakan publik adalah tindakan atau keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dibuat untuk mengatasi masalah publik. Contohnya, kebijakan pembatasan BBM subsidi bertujuan mengatasi pembengkakan APBN dengan memberikan subsidi hanya kepada kelompok tertentu, seperti kendaraan umum dan motor di bawah 150cc. Kebijakan ini termasuk dalam model rasional, di mana pemerintah berupaya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui prinsip *maximum social gain*.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengambilan Keputusan Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Penulis : Wahyu Priandanata¹, Danni Andreas², Adam Jamal³.

Kebijakan subsidi pupuk dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, implementasinya kurang efektif karena distribusi pupuk sering terlambat, jenis pupuk subsidi terbatas (hanya Urea dan NPK), dan jumlah yang diberikan tidak mencukupi

kebutuhan petani. Akibatnya, petani harus membeli pupuk non-subsidi mahal atau berkualitas rendah, yang berdampak pada hasil panen. Revisi kebijakan, pengawasan ketat, dan keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk memastikan subsidi pupuk tepat sasaran, mendukung produktivitas pertanian, dan memenuhi kebutuhan spesifik petani lokal.

Subsidi Elpiji Untuk Siapa? Mendorong Perbaikan Kebijakan Sebagai Instrumen Kesejahteraan

Penulis : Ruddy Kaharudin Gobel¹, Bambang Shergi Laksmono², Martani Huseini⁴, Mia Siscawati⁵

Kebijakan subsidi elpiji berbasis barang saat ini lebih banyak berdampak negatif. Sebagai alternatif, subsidi dapat diubah menjadi bantuan langsung kepada rumah tangga, meskipun hal ini menghadapi tantangan, seperti persepsi publik bahwa subsidi dicabut dan kebutuhan data akurat tentang rumah tangga miskin serta mekanisme penyaluran yang efektif. Tantangan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan data DTKS, mekanisme perbankan yang sudah digunakan dalam program BPNT, dan teknologi canggih seperti kartu debit atau biometrik. Jika kebijakan ini berhasil diterapkan, manfaatnya mencakup penyaluran

subsidi yang lebih tepat sasaran, penghematan APBN, inklusivitas sosial dan gender, serta peningkatan ekonomi lokal.

Pengaruh Tingkat Penggunaan Energi Listrik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Penulis : Ulkya Maisarah^{1*}, Puti Andiny², Safuridar Safuridar³

Berdasarkan analisis model VECM, dalam jangka pendek listrik dan jumlah penduduk tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat hubungan kausal satu arah. Sebaliknya, emisi CO₂ berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, listrik, jumlah penduduk, dan emisi CO₂ semuanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan dan pemerataan akses energi listrik di seluruh Indonesia serta kebijakan efisiensi energi untuk menekan peningkatan emisi CO₂.

Analisis Perubahan Pola Konsumsi Rumah Tangga : Dampak Perubahan Harga BBM (Studi Kasus Kecamatan Kemuning Palembang)

Penulis : Muhammad Said*)

Perubahan harga BBM memengaruhi pola konsumsi masyarakat berpendapatan rendah. Terjadi efek substitusi, di mana pengeluaran untuk kebutuhan non-

makanan beralih ke kebutuhan makanan. Selain itu, efek pendapatan juga terlihat dengan perubahan pola konsumsi makanan saat pendapatan meningkat.

Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan

Penulis : Dora Kusumastuti

Pemberian subsidi perumahan merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, mengingat harga pasar perumahan yang tinggi sulit dijangkau oleh mereka. Namun, pembangunan perumahan bersubsidi menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat serapan dibandingkan dengan meningkatnya kebutuhan akan rumah

KESIMPULAN

Kebijakan subsidi memengaruhi keputusan konsumsi rumah tangga dengan mengubah alokasi pengeluaran. Subsidi barang, seperti BBM atau elpiji, cenderung mendorong peningkatan konsumsi barang bersubsidi, tetapi dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan pola konsumsi yang tidak efisien. Sebaliknya, subsidi langsung yang tepat sasaran dapat membantu rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan dasar tanpa mengubah pola konsumsi secara signifikan, sekaligus mengurangi beban anggaran

pemerintah. Subsidi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi beban biaya di berbagai sektor seperti energi, pangan, dan pendidikan. Subsidi energi mendukung akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan, subsidi pangan membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga terutama saat menghadapi tantangan seperti El Nino, dan subsidi pendidikan mendorong pemerataan akses pendidikan. Meskipun kebijakan subsidi ini penting, implementasinya masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran, ketidaksesuaian alokasi anggaran, dan tantangan teknis lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, evaluasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan untuk memastikan efektivitas subsidi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Kemiskinan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

- Kementerian ESDM. (2022). *Kebijakan Subsidi Energi: Laporan Tahunan 2022*. Jakarta:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Tulus, T. H. (2021). *Efek Subsidi terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB Press.
- World Bank. (2022). *Fuel Subsidy Reform in Developing Economies: Lessons and Challenges*. Washington, DC: The World Bank Group.
- Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Data Kemiskinan di Sumatera Barat*. Padang: BPS Sumatera Barat.
- Santoso, B. D., & Wijaya, R. (2020). *Ekonomi Publik: Teori dan Implementasi Kebijakan Subsidi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harian Kompas. (2022). "Subsidi Listrik Tepat Sasaran: Studi Kasus di Sumatera Barat." *Kompas Online*.
- Spencer, M. H., & Amos, O. M. (1993). *Contemporary Economics*. New York: Worth Publishers.
- Solikhah, N., & Bramastia, R. (2024). "Kebijakan Energi Terbarukan dan Transisi Energi di Indonesia. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 12(1), 45-67.
- Eze, C., Sobrosa Neto, R., & Garcia, A. F. (2023). "Renewable Energy Policy Implementation: A Comparative Analysis." *Renewable Energy Journal*, 78, 1234-1248.
- Sobrosa Neto, R., Garcia, A. F., & Rocha, D. M. (2020). "Policy Innovations for Renewable Energy Adoption." *Energy Policy Journal*, 56, 112-119.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kebijakan Subsidi Energi*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Tulus, T. H. (2021). *Subsidi dan Ekonomi Publik: Analisis Kebijakan di Negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Laporan Subsidi Pendidikan Tahun 2022-2023*. Jakarta: Kemdikbud RI.
- World Bank. (2022). *Subsidy Reform in Developing Countries: Challenges and Opportunities*. Washington, DC: The World Bank.
- Kompas. (2022). "Subsidi Energi dan Pengaruhnya terhadap Rumah Tangga." *Kompas Online*.

- Badan Pangan Nasional. (2024). *Laporan Bantuan Pangan Beras CPP: Strategi Menghadapi Risiko Cuaca Ekstrem*. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Saefudin, M. (2023). "Ketahanan Pangan Indonesia: Tantangan Produksi dan Risiko El Nino." *Jurnal Agribisnis dan Ketahanan Pangan*, 15(2), 102-118.
- Tumbel, F. A., Kalangi, L., & Lomboan, K. (2021). "Program Bantuan Pangan dan Dampaknya pada Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 9(3), 215-229.
- Habibi, M., Purnamasari, R., & Akbar, N. (2022). *Analisis Manajemen Pembiayaan di Sekolah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fironika, E. (2015). "Masalah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Realita dan Tantangan." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 7(4), 134-148.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Kemiskinan dan Distribusi Beras di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- World Bank. (2022). *Climate Risks and Food Security: The Role of El Nino in Global and Regional Agriculture*. Washington, DC: The World Bank Group.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemdikbud RI.